

Analisis Pengeluaran Sektor Pariwisata Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia

Azzahra Endah Adrita¹, Isra Yeni²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: endahadritaazzahra@gmail.com, israyeni991@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

17 Februari 2025

Disetujui:

07 Maret 2025

Terbit daring:

16 Maret 2025

DOI: -

Sitasi:

Adrita, Azzahra Endah & Yeni, Isra (2025). Analisis Pengeluaran Sektor Pariwisata Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia

Abstract:

This study aims to analyze the impact of tourism sector expenditure on income inequality in Indonesia. This study uses secondary data from the publication of the Central Statistics Agency (BPS) using the main variables of tourist expenditure and poverty, as well as control variables of economic growth, education, and labor force participation rate, with the dependent variable being income inequality. In this study, a panel data regression analysis tool was used using the random effect model method with cross-section data from 34 provinces in Indonesia and a time series from 2015-2022. The findings show that tourist expenditure has a negative and significant effect on income inequality. However, the contribution is not large to income inequality, so the government needs to increase economic growth by equalizing access to education and eradicating poverty so as to reduce income inequality in Indonesia.

Keywords: Tourism Sector Expenditure, Income Inequality, Panel Data Regression

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran sektor pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan variabel utama pengeluaran wisatawan dan kemiskinan, serta variabel kontrol pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan tingkat partisipasi tenaga kerja, dengan variabel terikat adalah ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel menggunakan metode *random effect model* dengan data *cross section* 34 provinsi di Indonesia dan *time series* dari tahun 2015-2022. Temuan menunjukkan bahwa pengeluaran wisatawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, kontribusi yang tidak besar terhadap ketimpangan pendapatan, maka pemerintah perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan sehingga mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci: Pengeluaran Sektor Pariwisata, Ketimpangan Pendapatan, Regresi Data Panel

Kode Klasifikasi JEL: O40, L95, L96

PENDAHULUAN

Menurut Tambunan (2001), negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, umumnya menghadapi dua tantangan utama: kesenjangan ekonomi serta tingginya tingkat kemiskinan. Kesenjangan ekonomi terlihat dari ketidakmerataan distribusi pendapatan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Sementara itu, tingkat kemiskinan ditandai dengan banyaknya individu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan ekonomi tidak hanya menjadi masalah di negara berkembang, tetapi juga di negara maju, dan tetap menjadi isu penting yang perlu terus dikaji.

Di negara berkembang, isu ketimpangan telah menjadi topik utama dalam perumusan kebijakan sejak tahun 1970-an. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan kebijakan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, yang justru memperburuk tingkat kesenjangan di masyarakat.

Lincoln Arsyad et al. (1997) menyatakan bahwa banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan tersebut tidak cukup efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Di negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Tingginya pertumbuhan ekonomi dinilai gagal mengurangi, apalagi menghapus, kemiskinan absolut di negara-negara tersebut.

Dengan kata lain, pertumbuhan GNP (Gross National Product) per kapita yang tinggi tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Di sejumlah negara berkembang, seperti India, Pakistan, dan Kenya, pertumbuhan GNP per kapita bahkan menyebabkan penurunan absolut dalam taraf hidup masyarakat miskin di perkotaan maupun pedesaan. Ketimpangan ekonomi ini terjadi di berbagai aspek, baik antar individu, wilayah, maupun sektor. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia dan turut berkontribusi pada krisis ekonomi tahun 1997 (Kuncoro, 2010).

Menurut standar Bank Dunia (2016), distribusi pendapatan di Indonesia termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (*moderate inequality*), di mana 20% penduduk berpendapatan tertinggi tetap menikmati porsi terbesar dari pendapatan nasional, diikuti oleh 40% penduduk berpendapatan menengah. Data distribusi pendapatan selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan ketimpangan yang semakin melebar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia dapat bergerak menuju tingkat ketimpangan tinggi (*highly inequality*) jika tren tersebut terus berlanjut.

Tabel 1 Gini Ratio Menurut Daerah di Indonesia Tahun 2015-2019

Nama Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	0,3365	0,337	0,329	0,325	0,32
Sumatera Utara	0,331	0,3155	0,325	0,318	0,316
Sumatera Barat	0,3305	0,3215	0,315	0,321	0,3065
Riau	0,365	0,347	0,325	0,327	0,3325
Jambi	0,3525	0,3475	0,3345	0,334	0,3225
Sumatera Selatan	0,347	0,355	0,363	0,358	0,335
Bengkulu	0,3735	0,3555	0,35	0,362	0,3345
Lampung	0,364	0,361	0,3335	0,346	0,33
Kepulauan Bangka Belitung	0,279	0,2815	0,279	0,281	0,2655
Kepulauan Riau	0,3515	0,353	0,3465	0,33	0,339
DKI Jakarta	0,426	0,404	0,411	0,394	0,3925
Jawa Barat	0,4205	0,4075	0,398	0,407	0,4
Jawa Tengah	0,382	0,3615	0,365	0,378	0,3595
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,4265	0,4225	0,436	0,441	0,4255
Jawa Timur	0,409	0,402	0,4055	0,379	0,367
Banten	0,3935	0,393	0,3805	0,385	0,363

Bali	0,388	0,37	0,3815	0,377	0,368
Nusa Tenggara Barat	0,364	0,362	0,3745	0,372	0,3765
Nusa Tenggara Timur	0,3435	0,349	0,359	0,351	0,3555
Kalimantan Barat	0,332	0,336	0,328	0,339	0,3225
Kalimantan Tengah	0,313	0,3385	0,335	0,342	0,3355
Kalimantan Selatan	0,3435	0,3415	0,347	0,344	0,334
Kalimantan Timur	0,3155	0,3215	0,3315	0,342	0,3325
Kalimantan Utara	0,304	0,3025	0,3105	0,303	0,2935
Sulawesi Utara	0,367	0,3825	0,395	0,394	0,3715
Sulawesi Tengah	0,372	0,3545	0,35	0,346	0,3285
Sulawesi Selatan	0,414	0,413	0,418	0,397	0,39
Sulawesi Tenggara	0,39	0,395	0,399	0,409	0,396
Gorontalo	0,4105	0,4145	0,4175	0,403	0,4085
Sulawesi Barat	0,3625	0,3675	0,3465	0,37	0,365
Maluku	0,339	0,346	0,332	0,343	0,322
Maluku Utara	0,283	0,2975	0,3235	0,328	0,311
Papua Barat	0,434	0,387	0,3885	0,394	0,3835
Papua	0,4065	0,3945	0,3975	0,384	0,3925
Indonesia (Nasional)	0,405	0,3955	0,392	0,389	0,381

Berdasarkan data Gini Ratio dari tahun 2015 hingga 2019, perkembangan ketimpangan pendapatan di tujuh provinsi menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk dianalisis. Secara keseluruhan, dari tahun 2015 hingga 2019, terlihat bahwa sebagian besar provinsi mengalami perbaikan dalam ketimpangan pendapatan, meskipun masih ada beberapa fluktuasi. Penurunan Gini Ratio di beberapa daerah seperti Bengkulu, Aceh, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif, sementara kenaikan di Riau dan Sumatera Selatan mengindikasikan masih perlunya upaya pemerataan ekonomi yang lebih merata (Alfadhillah et al, 2023).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat koefisien Gini sebesar 0,281 pada periode 2015-2019, menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan provinsi lainnya. Beberapa daerah seperti Bengkulu, Aceh, dan Sumatera Barat mengalami penurunan Gini Ratio, menandakan perkembangan positif dalam pemerataan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan Gini Ratio di Riau dan Sumatera Selatan menunjukkan masih adanya tantangan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.

Di Sumatera Barat, tingkat ketimpangan pendapatan tergolong menengah, dengan rata-rata koefisien Gini sebesar 0,321, mencerminkan distribusi pendapatan yang relatif merata. Namun, daerah pedesaan yang bergantung pada sektor informal seperti pertanian

dan perdagangan kecil tetap berisiko mengalami ketimpangan yang lebih tinggi akibat fluktuasi ekonomi. Meskipun ketimpangan pendapatan di beberapa daerah telah menurun, pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetap diperlukan, terutama bagi wilayah yang mengandalkan sektor informal dengan pendapatan tidak tetap.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari sektor pariwisata. Sektor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara, menciptakan serta meratakan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat lokal, mendorong pembangunan daerah, serta memperkenalkan kekayaan alam dan budaya. Menurut penelitian Garson et al. (2015), sektor pariwisata diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di dunia pada tahun 2050. UNWTO (2005) juga menyebutkan bahwa pariwisata berperan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi suatu negara. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (UNWTO, 2015). Pada tahun 2017, pariwisata menyumbang 10% dari total PDB dunia, menyediakan satu dari sepuluh lapangan kerja global, menghasilkan pendapatan ekspor sebesar US\$1,4 triliun, serta berkontribusi sebesar 7% dari total ekspor dunia dan 30% ekspor jasa.

Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perdagangan internasional di sektor pariwisata dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Namun, ada juga temuan yang menyatakan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Li, Chen, Li, & Goh (2016) menggunakan data dari 30 provinsi di Cina selama periode 1997 hingga 2010 menunjukkan bahwa pariwisata justru mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut menemukan bahwa pariwisata domestik memiliki peran yang lebih besar dalam menekan ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan pariwisata internasional.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (2024) mengenai Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per Kunjungan Menurut Negara Tempat Tinggal (US \$) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2018–2023. Secara keseluruhan, fluktuasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pandemi, biaya transportasi, pembatasan perjalanan, dan pemulihan ekonomi global, yang memengaruhi pola pengeluaran wisatawan dari berbagai negara.

Penelitian Zhang, Qiu, & Meng (2015) di Cina menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu memperbaiki kondisi ekonomi di daerah tertinggal lebih efektif dibandingkan dengan daerah maju. Temuan ini mendukung pandangan bahwa pariwisata dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan di Cina. Sementara itu, Haddad, Porsse, & Rabahy (2013) dalam studi mereka di Brazil menemukan bahwa pariwisata domestik memainkan peran penting dalam menekan ketimpangan pendapatan di berbagai wilayah negara tersebut.

Salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan saling berkaitan, di mana tingginya tingkat kemiskinan cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan (Istiqomah & Floresti, 2024). Dengan demikian, pengentasan kemiskinan berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan (Saleem et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan, sehingga kelompok masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pembangunan ekonomi (Kakwani & Son, 2013).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, tetapi harus disertai dengan pemerataan pertumbuhan serta pengurangan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Adeleye (2020) menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat menekan tingkat ketimpangan pendapatan, yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat dampak positif dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Rubin & Segal (2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan, di mana ketimpangan dipengaruhi oleh bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu disertai dengan upaya mengurangi ketimpangan pendapatan (Sehrawat & Giri, 2018).

Faktor lain yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan adalah tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam menekan ketimpangan, karena akses terhadap pendidikan berkualitas dapat meningkatkan peluang hidup yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Olupona, 2018). Oleh sebab itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan, penting untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang bermutu, karena hal ini dapat meningkatkan modal manusia dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih setara bagi semua kelompok masyarakat (Hofmarcher, 2021).

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga menjadi faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, yang pada akhirnya membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Namun, dampaknya terhadap ketimpangan sangat bergantung pada jenis pekerjaan serta distribusi pendapatan tenaga kerja (Langoday & Man, 2024). Menurut Carr-Hill (2017), pertumbuhan partisipasi tenaga kerja yang tinggi justru dapat memperburuk ketimpangan pendapatan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja, diperlukan peningkatan keterampilan serta penyediaan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak, sehingga dapat menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Berdasarkan uraian pro dan kontra yang sudah di jelaskan di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Analisis Pengeluaran Sektor Pariwisata Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia " Di dalam Penelitian ini penulis akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat membantu pemerintah dalam upaya pemerataan distribusi pendapatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif. Metode deskriptif disusun berdasarkan data sekunder, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan. Analisis kuantitatif menggunakan model data panel. Penelitian yang dilakukan saat ini bertempat di 34 Provinsi Indonesia. Sedangkan data yang digunakan dalam waktu penelitian pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan data Time series 2015-2019 dan data Cross section 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lain.

Peneliti menggunakan alat Analisis Regresi Data Panel, (Basuki, 2016) menyebutkan regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross sectional*. Analisis regresi data panel dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan secara individual diikuti oleh titik waktu tertentu dengan variabel bebas adalah pengeluaran wisatawan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan variabel terikat kemiskinan. Adapun model regresi dalam penelitian ini dapat dimodelkan sebagai berikut:

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Expandwis}_{it} + \beta_2 \text{Gov}_{it} + \beta_3 \text{Growth}_{it} + \beta_4 \text{edu}_{it} + \beta_5 \text{TPAK}_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan

Y	:	Ketimpangan Pendapatan
Expandwis	:	Pengeluaran Wisatawan
Pov	:	Kemiskinan
Growth	:	Pertumbuhan Ekonomi
edu	:	Pendidikan
i	:	Cross Section (34 Provinsi)
t	:	Time Series (2015-2022)
β_0	:	Intercept
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4,$:	Koefisien
β_5	:	
μ_{it}	:	Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi estimasi Random Effect Model, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Inequality} = 0.39 - 0.007 * \text{LOG}(\text{Expandwis}) + 0.003 * \text{POV} - 0.0003 * \text{Growth} - 0.006 * \text{EDU} + 0.0005 * \text{TPAK} + \mu_{it}$$

Variabel pengeluaran wisata dengan nilai koefisien sebesar -0.007, maka pengeluaran wisata berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini, menunjukkan bahwa peningkatan 1% pengeluaran wisata maka akan menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0.007% di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pengeluaran wisatawan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pengeluaran wisatawan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dengan membeli produk dan menggunakan jasa warga lokal sehingga meningkatkan pendapatan usaha kecil dan menengah yang mengurangi ketimpangan pendapatan. Maka dampak peningkatan pengeluaran wisatawan yang melibatkan penduduk lokal terutama penduduk pendapatan rendah akan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga, pemerintah perlu menerapkan kebijakan inklusif dan keadilan ekonomi.

Hasil temuan sejalan dengan temuan menemukan bahwa pengeluaran pariwisata berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan terutama di negara berkembang (Nguyen et al., 2020; Seetanah et al., 2023). Hal ini, dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran wisatawan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan meningkatnya terutama pariwisata internasional cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan terutama di negara berpenghasilan rendah menengah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menemukan bahwa pengeluaran wisatawan berdampak meningkatkan ketimpangan pendapatan, karena manfaat pariwisata yang tidak terdistribusi secara merata yang hanya menguntungkan mereka yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih baik (Zhang, 2021). Temuan Canh (2020) menemukan bahwa pengeluaran wisatawan asing berdampak meningkatkan kerentanan ekonomi dan pengeluaran wisatawan domestik signifikan dalam mengurangi kerentanan ekonomi, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan baru dan pengurangan ketimpangan pendapatan.

Namun dampak pengeluaran wisawatan tidak memberikan kontribusi besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, dengan seiring pertumbuhan pendapatan pariwisata pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan sesuai dengan hipotesis kurva Kuznets (Alam & Paramati, 2016). Maka, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dinamika dan menyesuaikan strategi dalam memaksimalkan manfaat dari sektor pariwisata dan memitigasi potensi dampak negati terhadap distribusi pendapatan.

Selanjutnya variabel kemiskinan dengan koefisien sebar 0.003, menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini, menunjukkan bahwa peningkatan 1% kemiskinan akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0.03% di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan, hal ini sejalan dengan teori segitiga kemiskinan-pertumbuhan ekonomi- ketimpangan pendapatan dimana distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan tingkat ketimpangan pendapatan semakin tinggi, karena tingginya perbedaan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin yang memperburuk ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Maka, dalam mengetasai masalah ketimpangan pendapatan pemerintah perlu menerapkan kebijakan redistribusi yang efektif untuk mempersempit ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memiliki kaitan erat satu sama lain yaitu memiliki hubungan dua arah yang berarti bahwa ketimpangan pendaptan dapat memperburuk kemiskinan dan kemiskinan berkontribusi dalam peningkatan ketimpangan pendapatan. Dalam jangka pendek dan jangka panjang ketimpangan pendapatan dapat meningkat kemiskinan, dan kemiskinan dapat juga memperburuk ketimpangan pendapatan (Sehrawat & Giri, 2018). Maka, dalam mengurangi ketimpangan pendapatan perlu pengetasan kemiskinan karena ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memiliki dampak dua arah satu sama lain.

Hal ini sejalan dengan teori segitiga kemiskinan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Nzeribe (2022) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan temuan Marashdeh (2017) yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan yang semakin rendah justru menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Maka, dalam meningkatkan distribusi pendapatan perlu diikuiti dengan pengetasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga ketimpangan pendapatan menurun.

Sementara, variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar -0.003 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan yang artinya peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi akan mengurangi ketimpangan pendapatan sebesar 0.003%. Temuan ini sejalan dengan teori *trickle down effect* bahwa kebijakan yang terlalu fokus dalam pengetasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi menyebabkan tingkat ketimpangan semakin tinggi. Hal ini, disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada kalangan tertentu sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak memberikan manfaat pada penduduk pendapatan rendah. Maka, dalam mengurangi ketimpangan pendapatan perlu penerapan kebijakan yang mempersempit dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa belum meratanya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Indonesia. Sehingga, pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh beberapa daerah tertentu. Niyimbanira (2017) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap pengetasan kemiskinan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi hanya memberikan manfaat pada daerah tertentu dan golongan tertentu sehingga tidak berdampak terhadap penduduk miskin.

Berikutnya, variabel pendidikan dengan nilai koefisien -0.006 menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya dengan peningkatan 1% pendidikan akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas individu dan pendapatan. Namun, akses pendidikan yang berkualitas terbatas maka manfaat pendidikan tidak merata sehingga pendidikan tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Untuk itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berkualitas dan merata disetiap provinsi dan daerah yang ada di Indonesia dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Karena ketidaksesuaian pendidikan dengan kualifikasi persyaratan pekerjaan akan berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena perbedaan upah yang berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Karena kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesesuaian pendidikan dengan kualifikasi tenaga kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan (Rongsheng Tang & Wang, 2021).

Variabel tingkat partisipasi tenaga kerja dengan koefisien sebesar 0.0005 menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya peningkatan 1% TPAK akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0.0005% di Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori dualisme yang menyatakan bahwa sektor formal dan informal memiliki karakteristik yang berbeda dan peningkatan TPAK tidak selalu meningkatkan distribusi yang merata. Maka, peningkatan TPAK terutama di sektor informal dengan upah rendah menyebabkan ketimpangan pendapatan antara kelompok formal di sektor formal dengan upah tinggi.

Berbeda dengan temuan Fithrian (2015) yang menemukan TPAK berdampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Untuk meningkatkan TPAK yang berkualitas dalam mengurangi ketimpangan pendapatan diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan sektor formal dan penghapusan diskriminasi di pasar tenaga kerja.

Wilde (2014) partisipasi tenaga kerja yang tinggi mengindikasikan bahwa terjadinya peningkatan jumlah penduduk tinggi, yang mana pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini, timbul terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang mana peningkatan partisipasi tenaga kerja yang tinggi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin (Okosun, 2012). Sehingga diperlukan peningkatan skill para tenaga kerja dalam mengurangi partisipasi tenaga kerja yang tidak terampil dengan pendapatan yang relatif rendah yang mempelebar ketimpangan pendapatan sehingga menyebabkan peningkatan kemiskinan (Wintara et al., 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan model *Random Effect Model* serta deskripsi terhadap hasil penelitian antara variabel bebas dengan variabel terikat seperti yang telah dijabarkan diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa pengeluaran wisatawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Melalui peningkatan pengeluaran wisatawan meningkatkan pendapatan terutama penduduk lokal karena menggunakan produk dan jasa lokal sehingga meningkatkan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, tingkat kemiskinan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan.

REFERENSI

- Adams, S., & Klobodu, E. K. M. (2018). Foreign Direct Investment, Remittances, and Income Inequality in Sub-Saharan Africa. *International Review of Applied Economics*, 32(4), 620-640.
- Alfadhillah, F. H., Windari, N. N., Nurparida, M., & Widyarif, M. A. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan di provinsi DI Yogyakarta (periode 2005-2021). *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 39-50.
- Bhagaskara, A. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kabupaten dan kota se-Jawa Timur pada tahun 2011-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4).
- Benos, N., & Karagiannis, S. (2018). Inequality and Growth in the United States: Why Physical and Human Capital Matter. *Economic Inquiry*, 56(1), 572-619. <https://doi.org/10.1111/ecin.12475>
- Canh, N. P., & Thanh, S. D. (2020). Domestic tourism spending and economic vulnerability. *Annals of Tourism Research*, 85(June), 103063. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103063>
- Faturrokhim, F. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dalam Negeri, Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2022* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- G'omez-M'endez, I., & Amornbunchornvej, C. (2023). Income, education, and other poverty-related variables: A journey through Bayesian hierarchical models. *Heliyon*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27968>
- Hall, C. M. (2019). *Tourism and Inequality: Problems and Prospects*. New York: Routledge.
- Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111-126
- Nguyen, C., Schinckus, C., Su, T., & Chong, F. (2020). The Influence of Tourism on Income Inequality. *Journal of Travel Research*, 60, 1426-1444. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0047287520954538>
- Niyimbanira, F. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 254-261. <http://www.econjournals.com>
- Nzeribe, G. E., Ezenekwe, U. R., Uzonwanne, C. M., Metu, A. G., & Madichie, C. V. (2022). Poverty-Growth-Inequality Triangle: Empirical Evidence From Nigeria. *Torun International Studies*.
- Olupona, T. (2018). The Impact of Education on Income Inequality. *Microeconomics: Welfare Economics & Collective Decision-Making EJournal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2139/ssrn.3485523>
- Ostry, M. J. D., Berg, M. A., & Tsangarides, M. C. G. (2018). Redistribution, inequality, and growth. *International Monetary Fund*.
- Petit, S. (2017a). International trade in services and inequalities: Empirical evaluation and role of tourism services. *Tourism Economics (The Business and Finance of Tourism and Recreation)*, 23. <https://doi.org/10.1177/1354816616672361>
- Petit, S. (2017b). International trade in services and inequalities: Empirical evaluation and role of tourism services. *Tourism Economics (The Business and Finance of Tourism and Recreation)*, 23(5), 1069-1075. <https://doi.org/10.1177/1354816616672361>
- Pi, J., & Zhang, P. (2018). Factor-biased public infrastructure and wage inequality, 1-16. <https://doi.org/10.1111/rode.12393>
- Raychaudhuri, A., & De, P. (2016). Trade, infrastructure, and income inequality in selected Asian countries: An empirical analysis, 257-278. <https://doi.org/10.1007/978-81-322-2797-7>

- Raza, S. A., Sharif, A., Wong, W. K., & Karim, M. Z. A. (2016). Tourism development and environmental degradation in the United States: Evidence from wavelet-based analysis. *Current Issues in Tourism*, 70, 1–23. <https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1192587>
- Raza, S. A., & Shah, N. (2017). Tourism growth and income inequality: Does Kuznets Curve hypothesis exist in top tourist arrival countries? *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22(8), 874–884. <https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1343742>
- Ratnasari, L. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 32–36. <https://doi.org/10.22437/pdpp.v5i2.4100>
- Sharpley, R. (2020). *Tourism, Economic Development, and the Discourse of Dependency*. New York: Routledge.
- Sart, G., Bayar, Y., & Danilina, M. (2024). Impact of education and income inequalities on life expectancy: insights from the new EU members. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1397585>
- Seetanah, B., Gopy-Ramdhaney, N., & Bhattu-Babajee, R. (2023). Can tourism curb income inequality?: Tourism Agenda 2030. *Tourism Review*. <https://doi.org/10.1108/tr-02-2022-0094>
- Sehrawat, M., & Giri, A. (2018). The impact of financial development, economic growth, income inequality on poverty: evidence from India. *Empirical Economics*, 55, 1585–1602. <https://doi.org/10.1007/S00181-017-1321-7>
- Tang, R., & Wang, G. (2021). Educational mismatch and income inequality. *Economic Modelling*. <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2021.105525>
- Tang, Rongsheng, & Wang, G. (2021). Educational mismatch and income inequality. *Economic Modelling*, 100(March 2020), 105525. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105525>
- UNWTO (2020). *World Tourism Highlights, 2020 Edition*. United Nations World Tourism Organization.
- Wintara, H., Masbar, R., & Suriani, S. (2021). Determinants of Socio Economic and Demographic Characteristics of Poverty in Aceh Province. *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.134>
- Wijayanti, E. S., & Aisyah, S. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi asing, inflasi, dan trade openness terhadap ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 534-540.
- Xu, M., Chen, S., Chen, J., & Zhang, T. (2023). Non-linear links between human capital, educational inequality and income inequality, evidence from China. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288966>
- Yang, J., & Qiu, M. (2016). The impact of education on income inequality and intergenerational mobility. *China Economic Review*, 37, 110–125. <https://doi.org/10.1016/J.CHIECO.2015.12.009>
- Zhang, J. (2021). The effects of tourism on income inequality: A meta-analysis of econometrics studies. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48, 312–321. <https://doi.org/10.1016/J.JHTM.2021.07.009>